

KLIPING

KELAUTAN



Disusun Oleh :

DEWINDA VILIA

Kelas : X TPHPI

SMKN 1 PANGANDARAN

2012

Surabaya Pusat Industri Kelautan

<http://okilukito.wordpress.com/2008/10/09/128/>



Perbaikan perahu nelayan umumnya masih tradisional

Kota Surabaya mempunyai peluang menjadi pusat industri kelautan. Selain mempunyai wisata bahari dan pelabuhan, kontribusi ekspor Jawa Timur melalui Surabaya cukup dominan, mencapai 30 persen di tingkat nasional. Nantinya industri kelautan melibatkan berbagai pihak terkait seperti dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sampai orang-orang yang menangani teknologi kebaharian. Apalagi Surabaya didukung dengan fasilitas dan akses memadai, Surabaya akan menjadi ikon kelautan.

Surabaya mempunyai wilayah laut 1.889 km² dengan panjang garis pantai 26,7 km. Sebagai kota maritim, Surabaya masih mempertahankan keberadaan 2.868 nelayan dengan hasil laut mencapai 9.500 ton per tahun. Di wilayah pesisir bagian timur terdapat tambak dengan luas 1400 ha. Sebagai kota pelabuhan, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, merupakan pelabuhan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2007 mencapai 34 juta ton, petikemas 1,8 juta TEUS. Kunjungan kapal ukuran 1.500 TEUS hingga 2.000 TEUS terus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah kapal berkujung tahun 2005 sebanyak 14.915 unit. Tahun 2006 sebanyak 15.467 unit. Sementara total bongkar muat tahun 2005 sebesar 6.185.853 ton, dan tahun 2006 meningkat menjadi 6.493.389 ton. Demikian pula penumpang yang naik dan turun pada tahun 2006 mencapai 916.961 orang. Walaupun sebagian besar produk dihasilkan dari daerah-daerah lain di luar Surabaya, namun hasil-hasil tersebut dibawa ke Surabaya sebagai pusat industri. Termasuk hasil-hasil laut dari kawasan Indonesia Timur. Semua urusan terkait dengan industri kelautan ada di Surabaya sehingga ketika orang memerlukan akan datang kesini. Hanya saja sarana pengolahan hasil laut di Surabaya 50 persen tidak termanfaatkan sehingga hasil laut

yang diekspor belum optimal. Diharapkan masuknya investor bisa memperkuat modal kerja dan meningkatkan jumlah dan kualitas ekspor. Tahun 2007 lalu nilai ekspor hasil kelautan dari Surabaya mencapai 570.817,60 ton dengan nilai 580 juta dollar. Mengingat potensi yang masih besar, tahun ini Surabaya mematok ekspor hasil kelautan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan. Targetnya nilai ekspor bisa menjadi 600 juta dollar AS. Nilai tersebut bisa ditingkatkan mengingat Indonesia sangat kaya akan hasil laut. Khususnya untuk udang dan tuna. Saat ini saja kedua komoditas tersebut mendominasi ekspor ke negara-negara tujuan seperti Jepang, Taiwan dan Thailand. Dari total nilai ekspor, lebih dari 90 persen merupakan hasil penjualan udang dan ikan tuna. Hasil laut dari Jawa Timur pun memegang peranan penting. Pasalnya, sekitar 30 persen hasil laut yang diekspor melalui Surabaya berasal dari daerah-daerah di Jatim. Tahun lalu volume ekspor mencapai 570 ribu ton dan bisa bertambah jika dioptimalkan. Oleh karena itu Pemkot Surabaya harus mengupayakan agar investasi masuk ke Surabaya agar modal kerja semakin kuat. Pasalnya, sarana pengolahan hasil laut sudah tersedia, tinggal mengoptimalkan semua sarana yang ada tersebut. Diharapkan setelah investor masuk dan menggarap langkah itu sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar lokasi pabrik pengolahan. Peluang investasi di sektor industri maritim lainnya masih terbuka cukup lebar.

Di sektor industri galangan kapal misalnya, terbitnya Undang-Undang Pelayaran membawa angin segar. Saat ini di Surabaya sedikitnya tercatat 14 industri galangan kapal baik besar dan kecil beroperasi dengan full capacity. Bahkan PT.PAL sebagai perusahaan galangan kapal BUMN terbesar dengan jumlah pekerja sekitar 3000 orang sudah mampu membangun kapal berbobot 10.000 gross tons (GT) dan mampu memperbaiki kapal berukuran hingga 20.000 GT dan full booked hingga tiga tahun ke depan. Keberadaan sejumlah perguruan tinggi di Surabaya yang mempunyai fakultas perkapalan dan kelautan seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Hangtuah, melengkapi Surabaya sebagai kota maritim. Kedua perguruan tinggi tersebut mempunyai peranan penting mendukung sumber daya manusia (SDM) industri kelautan di Surabaya. Ke depan diharapkan, industri bioteknologi kelautan, industri mineral laut, dan industri air laut yang masih belum banyak disentuh, dapat dikembangkan di Surabaya. Pemkot Surabaya seharusnya jeli membaca peluang yang akan meningkatkan pendapatan daerah, dengan menawarkan peluang investasi di sektor industri kelautan ini.

KKP Tetapkan 'Grand Strategy' Produksi

<http://infopublik.kominfo.go.id/index.php?page=news&newsid=35388>



Gorontalo, InfoPublik - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan industrialisasi kelautan dan perikanan sebagai grand strategy dengan fokus pada peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditasnya untuk kesejahteraan rakyat.

Penetapan grand strategy ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, tecermin pada pengembangan potensi perikanan yang diakselerasikan dengan pembangunan kelautan di Tanah Air.

“Potensi perikanan seperti di wilayah Sulawesi dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan, atau potensi di Provinsi Gorontalo yang merupakan sentra penghasil komoditas perikanan di wilayah timur Indonesia, yang seluruhnya dapat diakselerasikan dengan pembangunan kelautan dan perikanan,” ungkap Menteri Sharif C. Sutardjo saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan perikanan, Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Minggu (4/11).

Dengan semangat industrialisasi perikanan, menurutnya kini terdapat tujuh faktor kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, pertama kesinambungan ketersediaan sumber daya ikan; kedua ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai; ketiga pengembangan (inovasi) dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan secara masif dan efektif.

Keempat sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten; kelima pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik; keenam dukungan investasi

dari para pelaku usaha; dan ketujuh regulasi pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Terkait dengan pengembangan pelabuhan perikanan, sampai saat ini jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia telah mencapai 816 unit, dengan rincian pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pusat sebanyak 23 unit (6 PPS, 14 PPN, 3 PPP), sedangkan sisanya sebanyak 793 unit dikelola oleh daerah serta 2 unit dikembangkan oleh swasta.

Dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Kwandang, Gorontalo Utara, Menteri Sharif memberikan bantuan dengan total nilai Rp7.664.300.000 berupa tiga unit Kapal Inka Mina30 GT senilai Rp 4.500.000.000; Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan tangkap untuk 16 KUB senilai Rp1.600.000.000; Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan sebanyak 150 bidang; Kartu Nelayan sebanyak 508 kartu; PUMP Perikanan Budidaya untuk 10 KUB senilai Rp1.000.000.000; PUMP P2HP untuk 10 kelompok senilai Rp500.000.000; bantuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk dua orang senilai Rp64.000.000 dan penyelenggaraan penyuluh sebanyak satu paket materi senilai Rp300.000.(rm)

SEKTOR KELAUTAN:

Menteri janji perikanan akan dioptimalkan

<http://www.bisnis.com/articles/sektor-kelautan-menteri-janji-perikanan-akan-dioptimalkan>



JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji mengoptimalkan produksi perikanan dalam negeri, merealisasikan perbaikan infrastruktur hulu—hilir, hingga memacu akselerasi pemasaran produk ke pasar ekspor.

Janji itu dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo usai memberikan sambutan pada acara Indonesia Fisheries Expo 2012 di Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Menurut Sharif, industrialisasi perikanan perlu dimulai dari perspektif produk berbasis pasar guna mencapai perluasan akses pemasaran baik di dalam negeri maupun negara tujuan ekspor.

“Jika kita mampu menguasai akses pasar secara baik, produksi perikanan baik dari sektor hulu hingga hilir akan turut terdongkrak” ujar Cicip.

Sharif menegaskan pergerakan impor produk perikanan akan dipaksa terus melambat sembari memperkuat produksi di dalam negeri. Dengan begitu, neraca perdagangan sektor perikanan diharapkan menunjukkan tren positif.

KKP menargetkan ekspor produk perikanan Indonesia dapat mencapai US\$4,2 miliar hingga akhir tahun ini, naik 16,6% dari pencapaian tahun lalu senilai US\$ 3,6 miliar. Kontribusi ekspor udang akan dipacu hingga US\$400 juta, serta nilai tambah ikan senilai US\$200 juta.

Namun, pernyataan Menteri itu ditanggapi lain oleh kalangan pengusaha. “Jangankan mengurus pasar, bahan baku saja masih sulit,” seloroh Erwin Ricardo Silalahi, Ketua Bidang Pengembangan Usaha Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia.

Edy Yuwono, Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia menilai pemerintah tidak pernah berpihak kepada pengusaha sehingga kontraproduktif terhadap ekspektasi peningkatan hasil produksi perikanan tangkap. Pasalnya, kapal-kapal tuna masih kesulitan mengakses bahan bakar.

“Kalau seperti ini kan situasinya dilematis. Kalau industrialisasi perikanan ingin berkembang, harus dipastikan ketersediaan bahan baku, juga kebutuhan sarana tangkapnya,” ketusnya.(msb)

MIMPI KAYA HARTA KARUN

Harta terpendam ratusan miliar rupiah diburu orang di laut nusantara. Lelangnya sepi?

http://sorot.news.viva.co.id/news/read/149618-mimpi_kaya_harta_karun/2



Dari Cirebon harta karun itu diangkut ke Pamulang. Ke sebuah areal pacuan kuda. Dari jalan raya, tempat itu tampak sepi. Luasnya 9,4 hektar. Setelah dibersihkan, semua harta karun dikunci di 20 istal kuda.

Penjagaan kawasan itu sangat ketat. Ada belasan herder, ada satuan pengaman. Pengamanan itu dibantu oleh sejumlah marinir, petugas polisi dan petugas Pannas BMKT--Panitia Nasional Barang Berharga Muatan Kapal Tenggelayam.

Semua harta karun itu dilelang Rabu, 5 Mei 2010. Jumlah harta yang dilelang 27.834 keping. Lelang ini melibatkan Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad. Tapi lelang itu batal. Sebabnya, peserta lelang sangat minim.

Luc Heymans, Direktur Cosmic Archeology Underwater Research and Recovery, tidak terkejut atas kegagalan panitia lelang barang berharga menarik minat calon peserta. Heymans bahkan sudah memperkirakan bahwa lelang tidak akan menarik peserta lelang.

"Saya tidak kecewa dan saya tidak terkejut. Tentu saja sudah mengira demikian," kata Heymans.

Heymans bisa memahami karena ada aturan yang menyulitkan peserta lelang. Yaitu mendeposit uang sebesar US\$ 16 juta terlebih dulu. "Well, saya cuma membatin, setidaknya saya akan dapat air minum gratis, kue gratis, dan kopi," kata Heymans tertawa.

Heymans memastikan bahwa tidak akan ada orang yang bersedia memberikan deposito 20 persen dari nilai keseluruhan harta karun itu. Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan promosi besar-besaran agar harta karun itu laku.

Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad prihatin dengan lelang sepi peminat ini. Meski tidak ada peminat, lelang akan terus digelar hingga ada keputusan presiden kapan dihentikan. Fadel berjanji akan mengundang sejumlah pengusaha asal Tiongkok. Sebab, kalangan ini yang dinilai paling potensial.

Sesungguhnya, kata Adi Agung, banyak yang berminat. Mereka mundur lantaran harus setor deposito senilai 20 persen dari nilai keseluruhan barang. "Jadi sekitar US\$ 16 juta dollar harus disetor untuk mengikuti lelang," katanya.

Laku atau tidak, lelang harta karun ini dipertanyakan sejumlah pengamat dan sejarawan. Menurut mereka, benda-benda langka itu dinilai jauh lebih berharga jika tidak dijual, terutama kepada pihak asing.

Ketua Komunitas Jelajah Budaya, Kartum Setiawan menilai barang itu lebih berharga jika tetap menjadi barang dan tidak ditukar menjadi uang. Sebab itu sejarah untuk generasi mendatang.

Peninggalan peradaban umat manusia itu, lanjutnya, sudah menjadi koleksi pribadi para kolektor kaya. "Benda itu kemudian diletakkan di rumah mewah, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja," kata dia.

Pengamat budaya, Joe Marbun, mencurigai lelang ini untuk kepentingan perusahaan. "Barang-barang ini kan diambil dari dasar laut pakai jasa perusahaan. Tentu perusahaan ini harus balik modal dong," katanya.

Bisnis harta karun memang gurih. Itu sebabnya banyak pula yang pemburu yang bergerak secara ilegal. Menurut Paimo, untuk para penyelam ilegal itu gajinya sekitar Rp 30 juta per bulan. "Beberapa teman saya sesama penyelam ada yang bekerja seperti itu," kata Paimo.

Lelaki berusia 32 tahun ini mengaku tidak tertarik masuk jalur gelap itu. Dia beralasan, "Saya tidak mau bekerja seperti orang yang dikejar-kejar." Dibanding jalur gelap itu, Paimo menerima gaji jauh lebih kecil, Rp 5 juta sebulan.

Dengan gaji segitu, dia mengaku berbahagia sebagai penyelam. Sebab selain mendapat gaji, juga bisa menunggang seekor hiu loreng yang melintas di laut lepas. Hiu jenis ini, katanya, tidak suka makan daging.

Blue Economy Perkuat Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

http://idolawebhost.com/dinas/index.php?option=com_content&view=article&id=123:blue-economy-perkuat-industrialisasi-kelautan-dan-perikanan&catid=36:berita&Itemid=140



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertekad untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan dengan berlandaskan konsep ekonomi biru (blue economy). Tekad tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1433 H di Akademi Perikanan Sidoarjo dan Wisata Kusuma Tirta Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/8).

Sharif memaparkan bahwa, industrialisasi kelautan dan perikanan dilandasi semangat blue economy dengan meninggalkan praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek dan telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani. "Pendekatan blue economy yang menekankan keberlanjutan diharapkan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global," jelasnya.

Industrialisasi kelautan dan perikanan merupakan proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan skala produksi sumber daya kelautan dan perikanan yang disinergikan dengan kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi serta IPTEK dan SDM. "Program ini pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi," jelasnya. Harian Bhirawa

Tujuh Kapal Vietnam Ditenggelamkan

<http://www.equator-news.com/kalbar-raya/20111229/tujuh-kapal-vietnam-ditenggelamkan>



Pontianak – Sebanyak tujuh unit kapal ikan asal Vietnam ditenggelamkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Perairan Pulau Datuk, Kabupaten Pontianak, Rabu (28/12). Kapal-kapal ikan itu akan dijadikan rumah ikan (rumpon) bagi kesejahteraan nelayan setempat.

Direktur Jenderal PSDKP Syahrin Abdurrahman menegaskan ketujuh kapal tersebut sudah in kracht. “Khusus untuk kapal-kapal yang sudah rusak parah seperti kapal Vietnam ini akan dijadikan rumpon,” katanya usai memimpin upacara penenggelaman kapal di Kantor Stasiun PSDKP, Sungai Rengas.

Menurut Syahrin, pihaknya juga berharap seluruh kapal-kapal pelaku illegal fishing rampasan negara itu dapat bermanfaat bagi nelayan. Sedangkan kapal yang kondisinya sudah rusak parah segera ditenggelamkan agar dapat menjadi rumah ikan di dasar laut.

Syahrin menjelaskan, manfaat lain dari kegiatan rumpon ini sekaligus menjadi solusi untuk beberapa persoalan penanganan barang bukti kapal tangkapan yang ada di dermaga Stasiun PSDKP Pontianak. Di antaranya, membersihkan kolam labuh dari ongkongan kapal bekas yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, karena mengganggu aktivitas pelayaran.

“Penenggelaman ini juga dapat memberikan pelajaran bagi para pelaku illegal fishing, bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam memberantas illegal fishing. Rumponisasi kapal hasil tindak pidana perikanan ini juga menjadi upaya kita bersama dalam perbaikan habitat ikan di laut,” jelas Syahrin.

Dia menjelaskan rumpon ini juga bisa menjadi tempat ikan berteduh, mencari makan, dan sebagai substrat untuk meletakkan telurnya bagi ikan-ikan tertentu, serta tempat berlindung (shelter) dari predator. Selain itu, bisa pula menjadi titik acuan navigasi (meeting point) bagi ikan-ikan tertentu yang menjadikan rumpon itu sebagai tempat berkumpul ikan bernilai ekonomi tinggi.

Ke depan, Syahrin juga mengatakan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan lebih ditingkatkan untuk menekan laju aktivitas illegal fishing. “Muaranya adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya, keberlanjutan mata pencarian masyarakat nelayan, dan peningkatan ekonomi,” jelasnya.

Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung Yudi Rianto yang turut menyaksikan rumponisasi kapal itu turut mendukung terobosan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. “Prinsipnya kita akan dukung terutama dalam hal penegakan hukum dan peningkatan perekonomian yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Teknik rumponisasi ini merupakan strategi mengumpulkan ikan dengan membentuk kondisi dasar laut menjadi mirip kondisi karang-karang alami. Rumpon membuat ikan merasa seperti mendapatkan rumah baru, baik ikan besar maupun kecil untuk berkumpul.

Sebelum diputuskan dijadikan rumpon, ketujuh kapal ikan asing ini diproses melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu, hingga berkekuatan hukum tetap (in kracht). Rata-rata kapal kayu berukuran antara 28 hingga 100 gross tonnage (GT) ini sudah rusak parah. (dna)

Sekilas Tentang Kapal Pengawas KKP

Jumlah Kapal Pengawas Tergolong Minim

http://kapalpengawas.blogspot.com/2011_04_01_archive.html



JAKARTA (Suara Karya) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, sarana untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kapal patroli, tergolong minim dan hanya mencapai 24 unit Keterbatasan ini membuat kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tidak optimal karena tidak sebanding dengan cakupan luas perairan laut

"Idealnya dari hasil penelitian Badan Riset KKP, kita seharusnya paling sedikit mempunyai 80 hingga 90 unit kapal pengawas. Namun, memang saat ini hanya bisa diberikan negara untuk pembelian 24 kapal pengawas," kata Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) KKP Willem Gasperz di sela pertemuan 100 Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas RI di Jakarta, Rabu (10/2) malam.

Menurutnya, apabila setiap tahun KKP mampu membeli dua hingga tiga kapal dengan dana APBN, maka untuk mencapai jumlah kapal pengawas yang ideal memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, KKP akan mencoba membuat terobosan melalui skema kredit komersial untuk pengadaan kapal dan rencana ini telah disetujui oleh Bappenas.

Rencananya, melalui kredit akan dilakukan pengadaaan sebanyak empat unit kapal Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SK1PI) dengan panjang 60 meter. Saat ini proses tendernya sudah dilakukan. Willem menjelaskan, saat ini jumlah nakhoda dan perwira kapal pengawas KKP mencapai 345 orang dan semuanya berstatus pegawai negeri sipil. "Jumlah ini masih sangat kurang sehingga kami akan menambah 60 nakhoda dan perwira kapal pengawas

dari tenaga kontrak. Nanti, apabila ada empat kapal SKIPI, maka kami akan menambah lagi tenaga kontrak," katanya.

Dia juga menjelaskan, pentingnya lugas pengawas perikanan yaitu untuk memeriksa kapal-kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal yang beroperasi di wilayah laut Indonesia. Ini termasuk kelengkapan surat-surat perizinan dan persyaratan kelautan dan juga surat izin kapal penangkap ikan.

Sasaran pengawasan ini untuk menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada di laut ini karena akan berbahaya bila setiap orang secara bebas melakukan eksplorasi sumberdaya laut tanpa ada aturan. "Jadi harus ada pengaturan dalam mengeksplorasi sumber daya laut agar kondisinya terpelihara atau bisa berlanjut sehingga bisa dinikmati oleh generasi mendatang," ujarnya seraya mencontohkan eksplorasi sumber daya laut yang tidak diatur di kawasan selatan Papua, mulai dari Timika sampai ke Afona.

KALBAR Andalan Sektor Kelautan Serap Tenaga Kerja

<http://beritadaerah.com/news/getContent/63322>



Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, pihaknya telah menjadikan sektor kelautan dan perikanan andalan penyedia lapangan pekerjaan.

"Dijadikannya sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor andalan karena bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak," kata Christiandy Sanjaya saat menyambut kedatangan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Jumat.

Apalagi, Kalbar didukung oleh sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan yang melimpah sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, kata Christiandy.

"Hingga saat ini sumbangan sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar cukup signifikan sehingga perlu terus dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar," ujarnya.

Data Pemerintah Provinsi Kalbar, tahun 2010 produksi perikanan budidaya sebanyak 21 ribu ton, kemudian meningkat menjadi 33 ribu ton pada 2011 atau naik 55 persen.

Kemudian armada tangkap juga mengalami peningkatan, tahun 2010 sebanyak 10.246 unit meningkat menjadi 14.541 unit tahun 2011, naik 41 persen, hasil perikanan tangkap juga mengalami peningkatan dari 90 ribu ton tahun 2010 menjadi 105 ribu ton pada 2011, naik 24 persen, kata Christiandy.

Sementara itu, volume ekspor ikan juga mengalami peningkatan, dari 157 ribu ton di tahun 2010, naik 24 persen dibandingkan tahun 2011.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan-nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arapura, dan perairan utara Sulawesi Utara.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 kilometer, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak dan 15.500 hektare laut.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut Cina Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.